

RANCANGAN AKHIR RENCANA KERJA SEKRETARIAT DAERAH TAHUN 2023



**SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN BLITAR
TAHUN 2023**

KATA PENGANTAR

Puji Syukur Kami Panjatkan Kehadirat Tuhan yang Maha Kuasa, karena atas Petunjuk dan HidayahNya sehingga Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Sekretariat Daerah Tahun 2023 dapat diselesaikan.

Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Sekretariat Daerah Tahun 2023 merupakan faktor mendasar guna lebih mengarahkan Tujuan serta Sasaran Perencanaan Pembangunan Daerah yang berkesinambungan dan dapat dipertanggungjawabkan untuk semua Kebijakan, Program dan Sasaran serta sebagai review evaluasi Rencana Kerja tahun lalu dan perkiraan capaian tahun anggaran berjalan.

Kami menyadari dalam penyusunan Rencana Kerja ini masih banyak terdapat kekurangan didalam penyajiannya untuk itu kami mengharapkan saran serta masukan dari berbagai pihak guna kesempurnaan untuk masa mendatang.

Blitar, Agustus 2022

SEKRETARIS DAERAH

Drs. IZUL MAROM, M.Sc

Pembina Utama Muda

NIP. 19650603 199002 1 002



DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan
 Capaian Renstra SKPD
- 2.2. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD
- 2.3. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

- 3.1. Tujuan dan Sasaran Renja Sekretariat daerah
- 3.2. Program dan Kegiatan Renja Sekretariat Daerah

BAB IV PENUTUP

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) mewajibkan setiap SKPD untuk menyusun Renja SKPD sebagai pedoman kerja selama periode satu tahun yang bersifat lebih operasional dan berfungsi sebagai terjemahan atas perencanaan Renstra. Renja Perubahan memuat program, kegiatan dan pagu indikatif yang akan dilaksanakan selama 1 (satu) tahun anggaran. Renja SKPD menjadi perangkat penting dalam menjelaskan serangkaian tindakan yang bersifat operasional yang perlu dilakukan dalam jangka pendek untuk mencapai tujuan dan arah kebijakan yang telah ditetapkan dalam Renstra.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah mengamanatkan bahwa perubahan RKPD dan Renja Perangkat Daerah dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan (asumsi prioritas pembangunan daerah, kerangka ekonomi daerah dan keuangan daerah, rencana program dan kegiatan RKPD yang berkenaan).


Renja Sekretariat Daerah tahun 2023 disusun dalam rangka mengatasi kesenjangan dan ketidaksesuaian yang terjadi setelah dilaksanakan evaluasi atas pelaksanaan Renja sampai dengan Tahun 2022.

Renja Sekretariat Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2023 disusun sebagai acuan dalam pelaksanaan kegiatan pada Tahun Anggaran 2023.

1.2. Landasan Hukum

Dasar hukum penyusunan Rencana Kerja Perubahan Sekretariat Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2021 adalah :

1. Undang-Undang No 12 tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkup Propinsi Jawa Timur
2. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
7. Permendagri No 54 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
8. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019
9. Permendagri No 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur 2014-2019

- 
11. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 24 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2005-2025
 12. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.
 13. Peraturan Bupati Nomor 73 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Blitar

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Renja Sekretariat Daerah Kabupaten Blitar tahun 2023 adalah untuk menentukan arah kebijakan pembangunan daerah di Bidang Administrasi Pemerintahan pada tahun 2023 dan untuk mewujudkan sinergitas rencana program dan kegiatan prioritas pembangunan daerah tahun 2023 dalam rangka mengatasi kesenjangan dan ketidaksesuaian yang terjadi setelah dilaksanakan evaluasi atas pelaksanaan Renja Tahun 2022.

Tujuan dari penyusunan Renja Sekretariat Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2023 ini adalah :

1. Untuk merencanakan berbagai kebijaksanaan dan strategi percepatan pembangunan daerah dibidang administrasi pemerintahan ke arah yang lebih baik disesuaikan dengan kondisi perubahan lingkungan yang cepat, transparan dan semakin kompleks.
2. Sebagai dasar atau acuan khususnya bagi Sekretariat Daerah Kabupaten Blitar dan berbagai komponen pembangunan daerah dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya.
3. Sebagai dasar untuk mengukur capaian kinerja dan melakukan penyesuaian terhadap perubahan yang mungkin terjadi.
4. Menjadi alat untuk menjamin keterkaitan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan.
5. Sebagai petunjuk operasional bagi penyelenggaraan pembangunan Kabupaten Blitar pada tahun anggaran 2023.

1.4 Sistematika Dokumen RENJA

RENJA Sekretariat Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2023 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan Renja agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

1.1. Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja PD, proses penyusunan Renja PD, keterkaitan antara Renja PD dengan dokumen RKPD, Renstra Perangkat Daerah, dengan Renja K/L dan Renja provinsi/Kabupaten/Kota, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan Rancangan APBD.

1.2. Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan Perangkat Daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah.

1.3. Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja Perangkat Daerah.

1.4. Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja PD, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1), mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Renja Perangkat Daerah sudah disahkan.

Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Perangkat Daerah berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun-tahun sebelumnya.

Review hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu, dan realisasi Renstra Perangkat Daerah mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan Perangkat Daerah dan/atau realisasi APBD untuk Perangkat Daerah yang bersangkutan.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD

Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam IKK.

Jenis indikator yang dikaji, disesuaikan dengan tugas dan fungsi masing-masing Perangkat Daerah, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan.

2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD

Berisi uraian mengenai sejauh mana tingkat kinerja pelayanan Perangkat Daerah dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan Perangkat Daerah, Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Perangkat Daerah, Dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah serta capaian program nasional/internasional, tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Perangkat Daerah, Serta Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan.

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Berisikan uraian mengenai proses yang dilakukan yaitu membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan, alasan proses tersebut dilakukan, serta temuan-temuan setelah proses tersebut dan catatan penting terhadap perbedaan dengan rancangan awal RKPD.

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.

Dalam bagian ini diuraikan hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan maupun berdasarkan hasil

pengumpulan informasi SKPD dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrenbang.

2.6. Evaluasi Pelaksanaan Renja PD

Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja dengan mengacu pada APBD tahun berjalan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra PD berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja PD tahun-tahun sebelumnya.

BAB III. TUJUAN, SASARAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB. KEGIATAN

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Telaahan terhadap kebijakan nasional dan sebagaimana dimaksud, yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja SKPD

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Perangkat Daerah.

3.3. Program dan Kegiatan

Penjelasan mengenai faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program, kegiatan dan sub. kegiatan, Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program, kegiatan dan sub. Kegiatan.

BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Berisikan uraian penjabaran dari tabel program, kegiatan dan sub. kegiatan.

BAB V. PENUTUP

Pada bab ini diuraikan catatan penting yang perlu mendapat perhatian, kaidah kaidah pelaksanaan, serta rencana tindak lanjut

BAB II


EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan Capaian Renstra Sekretariat Daerah

Sebagaimana amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, setiap dokumen perencanaan harus dievaluasi dalam pelaksanaannya. Oleh karena itu dalam Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2023 juga harus dilakukan evaluasi terhadap dokumen rencana kerja tahun 2022. Evaluasi terhadap Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Blitar meliputi 3 (tiga) hal, yaitu realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan; realisasi program/kegiatan yang memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan dan realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan.

Capaian Renstra SKPD Dalam penyusunan Rencana Kerja Sekretariat Daerah Tahun 2023 tidak terlepas dari evaluasi terhadap program/kegiatan dan penggunaan anggaran di tahun 2022 dan 2021, yang meliputi evaluasi Rencana Kerja tahun 2022 dan tahun 2021 terhadap Program/kegiatan, sasaran, indikator kinerja, realisasi capaian kinerja terhadap Renstra, target kinerja, anggaran Rencana Kerja Sekretariat Daerah, Realisasi kinerja dan realisasi anggaran pada Tahun Anggaran 2022 dan Tahun Anggaran 2021. Realisasi pelaksanaan anggaran untuk tahun 2022 dan tahun 2021 dapat diuraikan sebagai berikut :

Secara umum Sekretariat Daerah Kabupaten Blitar telah dapat melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sebagai lembaga pemerintah daerah di Kabupaten Blitar untuk melaksanakan kebijakan daerah. Dalam melaksanakan program dan kegiatan yang bersifat administratif maupun bersifat teknis secara proposional telah berjalan dengan baik. Indikator keberhasilan terhadap pelaksanaan tugas ini adalah adanya komitmen kerja



yang baik antara kepala bagian beserta bawahanya dan penguasaan di bidang tugas masing-masing pegawai dengan baik.

Berikut Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Sekretariat Daerah s/d Tahun 2022 Kabupaten Blitar :

Tabel 2.1

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Sekretariat Daerah s/d Tahun 2023 Kabupaten Blitar

Kode	Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2021			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan					
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun berjalan)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)				
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)*100%	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)				
4					UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN									
4	01				SEKRETARIAT DAERAH									
4	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA									
4	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah									
4	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10	10	10	6	60%	10	26	2.6
4	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah									
4	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	127	127	127	127	100%	127	381	3.0
4	01	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	6	6	6	4	67%	6	16	2.7
4	01	01	2.14		Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan									
4	01	01	2.14	01	Fasilitasi Keprotokolan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan	110	110	110	85	77%	110	305	2.8
4	01	01	2.14	02	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	120	120	120	78	65%	120	318	2.7

Kode	Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2021			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)*100%	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
4 01 01 2.14 03	Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan	220	220	220	100	45%	220	540	2.5
4 01 02	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT									
4 01 02 2.01	Administrasi Tata Pemerintahan									
4 01 02 2.01 01	Penataan Administrasi Pemerintahan	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan	2	2	2	2	100%	2	6	3.0
4 01 02 2.01 02	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	3	3	3	1	33%	3	7	2.3
4 01 02 2.01 03	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	2	2	2	1	50%	2	5	2.5
4 01 02 2.04	Fasilitasi Kerja Sama Daerah									
4 01 02 2.04 01	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	25	25	25	18	72%	25	68	2.7
4 01 02 2.04 02	Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri	1	1	1	1	100%	1	3	3.0
4 01 02 2.04 03	Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	2	2	2	1	50%	2	5	2.5
4 01 02 2.03	Fasilitasi dan Koordinasi Hukum									
4 01 02 2.03 01	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun	530	530	530	305	58%	530	1365	2.6
4 01 02 2.03 02	Fasilitasi Bantuan Hukum	Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum	3	3	3	3	100%	3	9	3.0

Kode	Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2021			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan					
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)				
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)*100%	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)				
4	01	02	2.03	03	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi	560	560	560	276	49%	560	1396	2.5
4	01	02	2.02		Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat									
4	01	02	2.02	01	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual Jumlah fasilitasi pengelolaan bina mental spritual (perayaan hari besar agama, haji daerah, MTQ, rukyatul hilah, peribadatan, pendidikan agama, kebijakan bidang keagamaan, rapat koordinasi bidang keagamaan)	3	3	3	1	33%	3	7	2.3
4	01	02	2.02	01	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual Jumlah fasilitasi pengelolaan bina mental spritual (perayaan hari besar agama, haji daerah, MTQ, rukyatul hilah, peribadatan, pendidikan agama, kebijakan bidang keagamaan, rapat koordinasi bidang keagamaan)	100	100	100	90	90%	100	290	2.9
4	01	02	2.02	02	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB	2	2	2	1	50%	2	5	2.5

Kode	Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2021			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan					
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)				
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)*100%	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)				
4	01	02	2.02	03	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas Jumlah penyusunan pelaksanaan dan evaluasi capaian kinerja kebijakan kesejahteraan masyarakat (urusan pemuda olahraga, kepramukaan, budaya, pariwisata, pendidikan, kependudukan pencatatan sipil, dan transmigrasi, dan batuan mahasiswa)	3	3	3	1	33%	3	7	2.3
						100	100	100	75	75%	100	275	2.8	
4	01	03			PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN									
4	01	03	2.01		Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian									
4	01	03	2.01	01	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	4	4	4	2	50%	4	10	2.5
4	01	03	2.01	02	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	5	5	5	3	60%	5	13	2.6
4	01	03	2.01	03	Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	2	2	2	2	100%	2	6	3.0

Kode	Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2021			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan					
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)				
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)*100%	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)				
4	01	03	2.04	Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam										
4	01	03	2.04	01	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, KUKM, Penanaman Modal, Tenaga Kerja	5	5	5	3	60%	5	13	2.6
4	01	03	2.04	02	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertambangan dan Sumber Daya Mineral, Lingkungan Hidup, Kominfo, Perhubungan, Statistik, Persandian	2	2	2	2	100%	2	6	3.0
4	01	03	2.04	03	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Energi dan Air, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Pertanahan	2	2	2	1	50%	2	5	2.5
4	01	03	2.02	Pelaksanaan Administrasi Pembangunan										
4	01	03	2.02	02	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	2	2	2	2	100%	2	6	3.0
4	01	03	2.02	03	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	1	1	1	1	100%	1	3	3.0

Kode	Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2021			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan					
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)				
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)*100%	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)				
4	01	03	2.03		Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa									
4	01	03	2.03	01	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	3	3	3	1	33%	3	7	2.3
4	01	03	2.03	02	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik	0	0	0	0	0%	0		
4	01	03	2.03	03	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	86	86	86	56	65%	86	228	2.7
4	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA									
4	01	01	2.13		Penataan Organisasi									
4	01	01	2.13	01	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan Jumlah perangkat daerah yang dievaluasi kelembagaannya Jumlah perangkat daerah yang telah menyelesaikan anjab dan ABK sesuai dengan SOTK yang berlaku presentase usulan penataan perangkat daerah yang ditindaklanjuti	2	2	2	1	50%	2	5	2.5
							51	51	51	35	69%	51	137	2.7
							51	51	51	34	67%	51	136	2.7
							100	100	100	65	65%	100	265	2.7
4	01	01	2.13	02	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana Jumlah perangkat daerah yang melaksanakan survey kepuasan masyarakat (SKM) dengan hasil	2	2	2	1	50%	2	5	2.5
							20	20	20	13	65%	20	53	2.7
							30	30	30	18	60%	30	78	2.6

Kode	Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2021			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan					
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)				
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)*100%	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)				
		indeks baik jumlah perangkat daerah yang mengembangkan inovasi pelayanan publik	35	35	35	19	54%	35	89	2.5				
		Jumlah perangkat daerah yang menyusun peta proses bisnis	35	35	35	22	63%	35	92	2.6				
		Jumlah perangkat yang dibina terkait dengan ke tatalaksanaan												
4	01	01	2.13	03	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	2	2	2	1	50%	2	5	2.5
					jumlah perangkat daerah dengan predikat AKIP minimal B	jumlah perangkat daerah yang telah menerapkan budaya kerja	51	51	51	24	47%	51	126	2.5
					jumlah perangkat daerah yang telah menerapkan budaya kerja	jumlah perangkat yang didampingi dalam implementasi reformasi birokrasi	7	7	7	3	43%	7	17	2.4
							51	51	51	33	65%	51	135	2.6
4	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA									
4	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah									
4	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	8	8	8	5	63%	8	21	2.6
4	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	6	6	6	5	83%	6	17	2.8
4	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1	1	1	1	100%	1	3	3.0

Kode	Usuran/Bidang Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2021			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)*100%	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
4 01 01 2.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12	12	12	7	58%	12	31	2.6
4 01 01 2.06 08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	220	220	220	112	51%	220	552	2.5
4 01 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	450	450	450	213	47%	450	1113	2.5
4 01 01 2.06 10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	2	2	2	2	100%	2	6	3.0
4 01 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah									
4 01 01 2.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2	2	2	2	100%	2	6	3.0
4 01 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	36	36	36	18	50%	36	90	2.5
4 01 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	12	12	7	58%	12	31	2.6
4 01 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah									
4 01 01 2.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	23	23	23	14	61%	23	60	2.6

Kode	Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2021			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)*100%	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
4 01 01 2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4	4	4	2	50%	4	10	2.5
4 01 01 2.09 11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	94	94	94	43	46%	94	231	2.5
4 01 01 2.12	Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah									
4 01 01 2.12 01	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan	6	6	6	4	67%	6	16	2.7
4 01 01 2.12 02	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	6	6	6	3	50%	6	15	2.5
4 01 01 2.12 03	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan	3	3	3	2	67%	3	8	2.7

Sumber : Sekretariat Daerah

a. Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan.

➤ **BAGIAN TATA PEMERINTAHAN**

- **Program Fasilitasi Koordinasi dan Perumusan Kebijakan Bidang Pemerintahan**

- Penyusunan LPPD Kabupaten Blitar
- Pengembangan Kapasitas dan Kinerja Kecamatan
- Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan Umum
- Fasilitasi Kerjasama Daerah
- Fasilitasi dan Penegasan Batas Desa

➤ **BAGIAN HUKUM**

- **Program Penataan Peraturan Perundang-undangan**

- Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah
- Kajian Peraturan Perundang-Undangan Daerah

- **Program Sosialisasi dan Dokumentasi Peraturan Perundang-Undangan Daerah**

- Fasilitasi Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Daerah
- Publikasi Peraturan Perundang-Undangan
- Pemeliharaan Sistem Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum

- **Program Fasilitasi Bantuan dan Pendampingan Hukum**

- Fasilitasi Penyelesaian Sengketa Hukum dan Peraturan Perundang-Undangan Daerah
- Penyuluhan Hukum dan Pembentukan / Pembinaan Kadarkum

➤ **BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT**

- **Program Fasilitasi dan Koordinasi serta Perumusan Kebijakan Bidang Kesejahteraan Rakyat**

- Fasilitas Pembinaan MTQ
- Fasilitasi Perumusan Kebijakan Pengembangan Sosial Masyarakat
- Fasilitasi Pembinaan Calon Jamaah Haji
- Fasilitasi Bimbingan Mental Spiritual Aparatur dan Masyarakat

- Fasilitas Peringatan Hari Besar Keagamaan
- Penetapan Rukyatul Hilal Awal Ramadhan, Syawal, dan Dzuhlijah

➤ **BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA**

- **Program Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa**

- Fasilitas Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa
- Fasilitas Layanan Pengadaan Barang / Jasa
- Monitoring dan Evaluasi Pengadaan Barang Jasa

➤ **BAGIAN ORGANISASI**

- **Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan Kinerja Aparatur Pemerintah Daerah**

- Peningkatan Kapasitas Kelembagaan
- Peningkatan Ketatalaksanaan Pemerintahan
- Peningkatan Kinerja Pemerintahan

➤ **BAGIAN PEREKONOMIAN**

- **Program Fasilitas Koordinasi dan Pengendalian Perekonomian dan Pembangunan Daerah**

- Fasilitas dan Koordinasi Kebijakan Pengembangan Perekonomian Daerah
- Fasilitas dan Koordinasi Kebijakan Pengembangan Produksi dan Promosi Daerah
- Fasilitas Administrasi Petugas Tim Koordinasi Pupuk dan Pestisida Bersubsidi

- **Program Sosialisasi Ketentuan di Bidang Cukai**

- Pemantauan dan Evaluasi Atas Pelaksanaan Ketentuan Peraturan Perundang Undangan di Bidang Cukai

➤ **BAGIAN UMUM**

- **Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**

- Penyediaan dan Peningkatan Administrasi Perkantoran
- Fasilitas Perjalanan Dinas Sekretariat Daerah

- **Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**

- Pendidikan dan pelatihan formal

- Peningkatan Kapasitas Kepemimpinan Bagi Pejabat Pemerintah Daerah
- **Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/wakil kepala daerah**
 - Fasilitasi Kunjungan Kerja dan Koordinasi KDH / WKDH
 - Penyelenggaraan Kerumahtanggaan KDH / WKDH
 - Pemeliharaan Sarana dan Prasarana KDH / WKDH
- **Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**
 - Pengadaan bahan/pakaian dinas beserta kelengkapannya
 - Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
 - Pengadaan Barang pakai Habis Sekretariat Daerah
 - Kegiatan Pemeliharaan Rutin / Berkala Sekretariat Daerah
- **Program Optimalisasi Pengelolaan Barang Asset Sekretariat Daerah**
 - Pencatatan Inventarisasi dan Pengelolaan Asset Sekretariat Daerah
- **BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN**
 - **Program Peningkatan Pelayanan Informasi, Dokumentasi Kehumasan dan Protokol**
 - Fasilitasi publikasi dan Advertorial Pembangunan Daerah
 - Pelayanan Seremonial Keprotokolan
 - Fasilitasi Pelayanan Kehumasan
- **BAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN**
 - **Program Perencanaan, penganggaran, pengendalian dan pelaporan capaian kinerja dan keuangan**
 - Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Pelaporan Capaian Kinerja
 - Penyusunan Dokumen Penganggaran dan laporan Keuangan
- **BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN**
 - **Program Fasilitasi Koordinasi dan Pengendalian Perekonomian dan Pembangunan Daerah**

- Fasilitasi, Evaluasi dan Pengendalian Kebijakan Pembangunan Daerah
- b. Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan**
 - **BAGIAN TATA PEMERINTAHAN**
 - **Program Fasilitasi, Koordinasi dan Perumusan Kebijakan Bidang Pemerintahan**
 - Penyusunan LPPD Kabupaten Blitar
 - **BAGIAN HUKUM**
 - **Program Sosialisasi dan Dokumentasi Peraturan Perundang-undangan**
 - Fasilitasi Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan Daerah
 - Publikasi Peraturan Perundang-undangan
 - Pemeliharaan Sistem Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum
 - **Program Fasilitasi Bantuan dan Pendampingan Hukum**
 - Penyuluhan Hukum dan Pembentukan/Pembinaan Kadarkum
 - **BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT**
 - **Program Fasilitasi dan Koordinasi serta Perumusan Kebijakan Bidang Kesejahteraan Rakyat**
 - Fasilitasi Perumusan Kebijakan Pengembangan Sosial Masyarakat
 - Fasilitasi Peringatan Hari Besar Keagamaan
 - **BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA**
 - **Program Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa**
 - Fasilitas Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa
 - Monitoring dan Evaluasi Pengadaan Barang/Jasa
 - **BAGIAN ORGANISASI**
 - **Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan Kinerja Aparatur Pemerintah daerah**
 - Pencapaian Program dan kegiatan yang dilaksanakan belum mencapai target yang ditentukan.
 - **BAGIAN PEREKONOMIAN**

- **Program Fasilitasi Koordinasi dan Pengendalian Perekonomian dan Pembangunan Daerah**
 - Kajian Peraturan Perundang-undangan Daerah
 - Fasilitasi dan Koordinasi Kebijakan Produksi dan Promosi Daerah
 - Fasilitasi Administrasi Petugas Tim Koordinasi Pupuk dan Pestisida Bersubsidi
 - Fasilitasi dan Koordinasi Kebijakan Kabupaten Pengelolaan ESDM dan SDA
- **Program Sosialisasi Ketentuan di Bidang Cukai**
 - Pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan di Bea Cukai

➤ **BAGIAN UMUM**

- **Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**
 - Fasilitas Perjalanan Dinas Sekretariat Daerah
- **Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**
 - Pengadaan barang pakai habis sekretariat daerah
 - Pemeliharaan rutin/berkala sekretariat daerah
- **Program Optimalisasi Pengelolaan Barang Aset Sekretariat Daerah**
 - Pencatatan inventarisasi dan pengelolaan aset sekretariat daerah

➤ **BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN**

- **Program Peningkatan Pelayanan Informasi, Dokumentasi Kehumasan dan Protokol**
 - Pencapaian program dan kegiatan untuk meningkatkan pelayanan informasi, dokumentasi kehumasan dan protokol belum memenuhi atau mencapai target.

➤ **BAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN**

- **Program Perencanaan, Penganggaran Pengendalian dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan**
 - Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Pelaporan Capaian Kinerja
 - Penyusunan Dokumen Penganggaran dan Pelaporan Keuangan

➤ **BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN**

- Fasilitasi, Evaluasi dan Pengendalian Kebijakan Pembangunan Daerah

c. Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/ keluaran yang direncanakan

➤ **BAGIAN TATA PEMERINTAHAN**

- **Program Fasilitasi, Koordinasi dan Perumusan Bidang Pemerintahan**

- Fasilitasi Kerjasama Daerah
- Fasilitasi Pengembangan Fasilitas Aparatur Pemerintah Desa

➤ **BAGIAN HUKUM**

- **Program Penataan Peraturan Perundang-undangan**

- Kajian Peraturan Perundang-undangan Daerah
- Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah

➤ **BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT**

- **Program Fasilitasi dan Koordinasi serta Perumusan Kebijakan Bidang Kesejahteraan Rakyat**

- Fasilitasi Pembinaan jamaah Calon Haji
- Fasilitasi pembinaan Mental Spiritual Aparatur dan Masyarakat

➤ **BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA**

- **Program Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa**

- Program dan Kegiatan yang terdapat dalam Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa belum memenuhi target yang ditetapkan.

➤ **BAGIAN ORGANISASI**

- **Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan Kinerja Aparatur Pemerintah daerah**

- Pencapaian Program dan kegiatan pada bidang organisasi yang dilaksanakan belum mencapai target yang ditentukan.

➤ **BAGIAN PEREKONOMIAN**

- **Program Fasilitasi Koordinasi dan Pengendalian Perekonomian dan Pembangunan Daerah**

- Program dan kegiatan yang dilaksanakan telah memenuhi target kinerja yang ditentukan

- **Program Sosialisasi Ketentuan di Bidang Cukai**

- Pencapaian program dan kegiatan telah memenuhi capaian kinerja kegiatan.

➤ **BAGIAN UMUM**

- **Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**

○ **Kegiatan Penyediaan dan Peningkatan Administrasi Perkantoran**

Indikator Persentase Kecukupan Administrasi Perkantoran telah melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan yaitu dari target 10325 dengan capaian 10327.

- **Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah**

- Penyelenggaraan kerumahtanggaan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah
- Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah
- Fasilitas Kunjungan Kerja dan Koordinasi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah

➤ **BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN**

- **Program Peningkatan Pelayanan Informasi, Dokumentasi Kehumasan dan Protokol**

- Pencapaian program dan kegiatan untuk meningkatkan pelayanan informasi, dokumentasi kehumasan dan protokol belum memenuhi atau mencapai target.

➤ **BAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN**

- **Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**

- Peningkatan sarana dan prasarana aparatur

➤ **BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN**

➤ **Program Fasilitasi Koordinasi dan Pengendalian Perekonomian dan Pembangunan Daerah**

- Program dan kegiatan yang dilaksanakan telah memenuhi target kinerja yang ditentukan

d. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/ kegiatan

➤ **BAGIAN TATA PEMERINTAHAN**

Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan adalah:

- Adanya perubahan aturan perundang-undangan yang mengakibatkan kegiatan tidak dapat dilaksanakan
- Keterbatasan anggaran
- Beberapa kegiatan melibatkan beberapa pihak yang lain mengakibatkan sulitnya tercapai target
- Kegiatan rutin yang harus dilaksanakan sehingga dapat terlaksana sesuai target
- Melebihi target karena sasaran kegiatan bertambah
- Pelaksanaan menyesuaikan kebutuhan permasalahan yang difasilitasi sehingga beberapa kegiatan dapat melampaui target yang telah ditetapkan.

➤ **BAGIAN HUKUM**

Faktor-faktor penyebab tercapainya atau melebihi target kinerja program/kegiatan adalah :

- Adanya keterbatasan anggaran
- Terpenuhinya usulan renperda dari OPD ke Bagian Hukum dan mendapatkan persetujuan dari DPRD

➤ **BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT**

Faktor-faktor penyebab tercapainya atau melebihi target kinerja program/kegiatan adalah :

- Terjadwalnya kegiatan di bagian kesra yang memfasilitasi berhubungan dengan masyarakat

- Banyaknya kegiatan yang ditentukan pada hari-hari tertentu

➤ **BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA**

Faktor-faktor penyebab tercapainya atau melebihi target kinerja program/kegiatan adalah :

- Waktu yang tidak cukup untuk melakukan proses tender ulang pengadaan Barang/Jasa secara elektronik

➤ **BAGIAN ORGANISASI**

Faktor-faktor penyebab tercapainya atau melebihi target kinerja program/kegiatan adalah :

- Belum adanya keselarasan antara dokumen perencanaan strategis dengan RPJMD dan Rencana Kerja Tahunan (RKT)
- Masih banyaknya OPD yang belum mempunyai inovasi pelayanan publik dan kurangnya pemahaman aparaturnya tentang budaya kinerja yang baik

➤ **BAGIAN PEREKONOMIAN**

Faktor-faktor penyebab tercapainya atau melebihi target kinerja program/kegiatan adalah :

- Dukungan kebijakan Pimpinan Daerah dan Kerjasama serta dukungan instansi vertikal sebagai tim untuk menyelesaikan permasalahan ekonomi di Kabupaten Blitar
- Peraturan perundang-undangan yang disusun sangat detail dan mudah diimplementasikan
- Kebijakan SOTK tentang kewenangan bagian perekonomian bidang ESDM dan Kehutanan baru ditetapkan dalam Perbup no. 6 tahun 2018
- Penetapan PAK yang terlambat
- Kurangnya anggaran untuk capaian kinerja kegiatan
- Sering terjadi perubahan kebijakan untuk alokasi anggaran DBHCHT
- Kekurangan staf dengan besarnya kewenangan

➤ **BAGIAN UMUM**

Faktor-faktor penyebab tercapainya atau melebihi target kinerja program/kegiatan adalah :

- Semua program dan kegiatan telah mencapai atau melebihi dari target yang ditentukan dengan adanya faktor pendorong keberhasilan kinerja yaitu tercukupinya anggaran dan perencanaan yang telah disesuaikan dengan kebutuhan.

➤ **BIDANG PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN**

Faktor-faktor penyebab tercapainya atau melebihi target kinerja program/kegiatan adalah :

- Untuk kegiatan fasilitasi publikasi dan advertorial pembangunan daerah dikarenakan kerjasama dengan media massa sudah terbagi dengan Dinas Kominfo
- Kurangnya SDM pemegang dokumentasi dan penulisan press release
- Kurangnya koordinasi OPD leading sektor kegiatan yang melibatkan kepala daerah.

➤ **BAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN**

Faktor-faktor penyebab tercapainya atau melebihi target kinerja program/kegiatan adalah :

- Kurangnya kerjasama antara aparatur tentang pencapaian target kinerja program/kegiatan.
- Kurangnya pemahaman antara aparatur bendahara dalam penatausahaan pengelolaan keuangan daerah

➤ **BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN**

Faktor-faktor penyebab tercapainya atau melebihi target kinerja program/kegiatan adalah :

- Monitoring evaluasi pembangunan di wilayah Kabupaten Blitar
- Peraturan perundang-undangan yang disusun sangat detail dan mudah diimplementasikan
- Penetapan PAK yang terlambat
- Kurangnya anggaran untuk capaian kinerja kegiatan
- Kekurangan staf dengan besarnya kewenangan

e. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra SKPD

Dari program dan kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Sekretariat Daerah Kabupaten Blitar, implikasi yang timbul adalah adanya peningkatan dedikasi sumber daya manusia dalam melaksanakan program/ kegiatan apabila target telah tercapai dan peningkatan kasus/masalah pelayanan di masyarakat apabila target belum tercapai. Namun tidak semua indikator yang belum tercapai secara langsung berdampak pada peningkatan pelayanan di masyarakat.

f. Kebijakan/ tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut

➤ **BAGIAN TATA PEMERINTAHAN**

1. Penyelarasan kegiatan antar stake holder
2. Perubahan anggaran pada saat PAK untuk optimalisasi beberapa kegiatan
3. Meningkatkan koordinasi dan konsultasi kepada instansi vertikal dan horizontal.

➤ **BAGIAN HUKUM**

Perubahan anggaran untuk meningkatkan beberapa program kegiatan

➤ **BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT**

1. Menyelesaikan yang bisa di proses lebih awal dalam penyerapan
2. Menyempurnakan RKPD selanjutnya

➤ **BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA**

Himbauan kepada OPD untuk mengajukan proses pengadaan Barang/Jasa sesuai dengan perencanaan.

➤ **BAGIAN ORGANISASI**

1. Diadakan bimbingan teknis dan sosialisasi penyusunan dokumen perencanaan (LKJIP) dan SAKIP
2. Diadakan rapat asistensi penyusunan peraturan Bupati tentang IKU
3. Diadakan rapat-rapat implementasi penerapan sistem SPM 6 layanan dasar
4. Diadakan evaluasi rapat koordinasi dan sosialisasi evaluasi penataan kelembagaan tentang SOTK dan penjabaran tupoksinya

5. Diadakan evaluasi, rapat koordinasi, bimbingan teknis, dan sosialisasi penataan UPT.

➤ **BAGIAN PEREKONOMIAN**

1. Penyusunan capaian kinerja bulanan untuk mempercepat capaian kinerja
2. Meningkatkan koordinasi dengan Kementerian Keuangan dan Pemerintah Provinsi Jawa Timur.

➤ **BAGIAN UMUM**

Meningkatkan koordinasi dan pemahaman tugas sangat perlu guna penyeimbangan dalam pelaksanaan program/kegiatan yang terarah serta relevansi antara program dan pagu anggaran yang tersedia

➤ **BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN**

Peningkatan kualitas SDM

➤ **BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN**

Meningkatkan koordinasi dan pemahaman tugas serta peningkatan kualitas SDM


➤ **BAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN**

Meningkatkan koordinasi dan pemahaman tugas serta peningkatan kualitas SDM

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Sekretariat Daerah

Penyusunan Rencana Kerja Tahun 2023 ini tidak terlepas dari Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi) Sekretariat Daerah Kabupaten Blitar, berdasarkan Peraturan Bupati Blitar Nomor 73 tahun 2019 tentang penjabaran tugas dan fungsi Sekretariat Daerah adalah sebagai penyusun kebijakan dan mengkoordinasikan Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah melalui penyusunan kebijakan pemerintahan daerah, pengkoordinasian pelaksanaan tugas Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan pemerintahan daerah, pembinaan administrasi dan aparatur pemerintahan daerah dan pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Sekretariat Daerah menyelenggarakan fungsi:

- 
- a. penyusunan kebijakan pemerintahan daerah;
 - b. pengkoordinasian pelaksanaan tugas dinas daerah dan lembaga teknis daerah;
 - c. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan pemerintahan daerah;
 - d. pengkoordinasian pelayanan administratif dan pembinaan aparatur sipil negara pada instansi daerah;
 - e. pengkoordinasian penyusunan dan perumusan laporan kinerja secara periodik kepada Bupati; dan
 - f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Sekretariat

Untuk pencapaian target kinerja tahun anggaran 2023 serta dalam melaksanakan Tugas, pokok dan fungsinya Sekretariat Daerah, Sekretariat Daerah Kabupaten Blitar mempunyai 4 (empat) program dalam urusan pelayanan umum, dimana dari masing-masing program tersebut terdapat beberapa kegiatan dan Sub. Kegiatan yang mengikutinya.

Program-program Sekretariat Daerah Kabupaten Blitar yang dilaksanakan pada tahun 2023 adalah sebagai berikut:

- a. Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
- b. Program Perekonomian dan Pembangunan
- c. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
- d. Program Penataan Administrasi Umum

Program, Kegiatan dan Sub. Kegiatan yang direncanakan dan dilaksanakan terkait dengan Visi dan Misi Kabupaten Blitar, juga diarahkan untuk mendukung terlaksananya visi misi Pemerintah Kabupaten Blitar.

Program, Kegiatan dan Sub. Kegiatan yang ada di Sekretariat Daerah Tahun 2023 adalah sbb:

I. Bagian Tata Pemerintahan

A. Program fasilitasi dan koordinasi serta perumusan kebijakan bidang pemerintahan

1. Kegiatan Pembinaan dan pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa

a. Sub. Kegiatan

- i. Fasilitasi penetapan dan penegasan batas desa

2. Kegiatan Adminitrasi Tata Pemerintahan

b. Sub. Kegiatan

- i. Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah
- ii. Pengelolaan Administrasi Kewilayahan
- iii. Penataan Administrasi Pemerintahan

3. Kegiatan Fasilitasi Kerjasama Daerah

c. Sub. Kegiatan

- i. Kerjasama Dalam Negeri
- ii. Evaluasi Pelaksanaan Kerjasama

II. BAGIAN HUKUM

A. Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat

1. Kegiatan Fasilitasi dan Koordinasi Hukum

a. Sub. Kegiatan

- i. Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah
- ii. Fasilitasi Bantuan Hukum
- iii. Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum

III. BAGIAN PEREKONOMIAN

A. Program Perekonomian dan Pembangunan

1. Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian

a. Sub. Kegiatan

- i. Koordinasi Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD
- ii. Koordinasi Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Energi Air
- iii. Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi dan Mikro Kecil
- iv. Pengendalian dan Distribusi Perekonomian
- v. Koordinasi Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan
- vi. Koordinasi Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup

IV. BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN

A. Program Perekonomian dan Pembangunan

1. Kegiatan Pelaksanaan Administrasi Pembangunan

a. Sub. Kegiatan

- i. Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan
- ii. Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan
- iii. Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan

V. BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA

A. Program Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa

1. Kegiatan Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa

a. Sub. Kegiatan

- i. Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa
- ii. Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik
- iii. Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa

VI. BAGIAN ORGANISASI

A. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

1. Kegiatan Penataan Organisasi

a. Sub. Kegiatan

- i. Pengelolaan Kelembagaan dan Analisa Jabatan
- ii. Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana
- iii. Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi
- iv. Monitoring dan Evaluasi Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana
- v. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah

VII. BAGIAN UMUM

A. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

1. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

a. Sub. Kegiatan

- i. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- ii. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
- iii. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- iv. Fasilitasi Kunjungan Tamu

2. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

b. Sub. Kegiatan

- i. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

- ii. Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik

3. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

c. Sub. Kegiatan

- i. Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan lainnya
- ii. Penyediaan jasa pemeliharaan biaya pemeliharaan pajak, dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan

4. Kegiatan Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah

d. Sub. Kegiatan

- i. Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah
- ii. Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah

VIII. BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN

A. Program Penataan Administrasi Umum

1. Kegiatan Protokol dan Komunikasi Pimpinan

a. Sub. Kegiatan

- i. Fasilitasi Keprotokolan
- ii. Fasilitasi Komunikasi Pimpinan
- iii. Pendokumentasian Tugas Pimpinan

IX. BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT

A. Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat

1. Kegiatan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat

a. Sub. Kegiatan

- i. Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual
- ii. Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial
- iii. Evaluasi Pelaksanaan kebijakan dan capaian kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat

X. BAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN

B. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

1. Kegiatan Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah



- a. **Sub. Kegiatan**
 - i. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
- 2. **Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**
 - b. **Sub. Kegiatan**
 - i. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir tahun SKPD
 - ii. Penyediaan Gaji dan Tunjangan PNS

2.4 Review terhadap RKPD

Dokumen Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) merupakan dokumen perencanaan daerah dengan periode satu tahun yang memuat seluruh program dan kegiatan seluruh OPD dengan prediksi Pagu Anggaran Indikatif yang bersumber dari APBD maupun APBN. RKPD disusun untuk menjabarkan RPJMD dan menjadi pedoman dalam penyusunan Renja OPD serta menjadi acuan proses penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA). Sebelum ditetapkan menjadi dokumen RKPD perlu dilakukan review terhadap Rancangan Awal tersebut untuk memastikan bahwa seluruh program dan kegiatan OPD telah terakomodir didalamnya.


Dalam Rancangan Awal RKPD Kabupaten Blitar terdapat 4 (empat) Program dan 15 (lima belas) Kegiatan yang menjadi tanggungjawab Sekretariat Daerah, yaitu:

I. Program

1. Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
2. Program Perekonomian dan Pembangunan
3. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
4. Program Administrasi Umum

II. Kegiatan

1. Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa.
2. Kegiatan Administrasi Tata Pemerintahan
3. Kegiatan Fasilitasi Kerjasama Daerah
4. Kegiatan Fasilitasi dan Koordinasi Hukum

- 
5. Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian
 6. Kegiatan Pelaksanaan Administrasi Pembangunan
 7. Kegiatan Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa
 8. Kegiatan Penataan Organisasi
 9. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
 10. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 11. Kegiatan Fasilitas Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah
 12. Kegiatan Protokol dan Komunikasi Pimpinan
 13. Kegiatan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat
 14. Kegiatan Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 15. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Dengan tetap mengacu pada Visi dan Misi Kabupaten Blitar serta tugas pokok dan fungsi Sekretariat Daerah Kabupaten Blitar maka pada tahun 2023 program, kegiatan dan sub. kegiatan yang direncanakan secara umum telah sesuai dengan yang tertuang dalam RKPD Kabupaten Blitar. Hal ini sudah sesuai dengan Rencana Kerja (Renja) Sekretariat Daerah Kabupaten Blitar tahun 2021 dimana didalamnya terdapat 4 (empat) program, 15 (lima belas) kegiatan dan 45 (empat puluh lima) sub. kegiatan yang secara umum dapat digambarkan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 2.4

Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2023

Sekretariat Daerah Kabupaten Blitar

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Pagu indikatif	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12
4											
4	01				16,432,937,042					16,432,937,042	
4	01	01			16,432,937,042					16,432,937,042	
4	01	01	2.01		134,576,013					134,576,013	
4	01	01	2.01	01	134,576,013					134,576,013	
4	01	01	2.02		15,467,413,989					15,467,413,989	
4	01	01	2.02	01	15,330,314,200					15,330,314,200	
4	01	01	2.02	05	137,099,789					137,099,789	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting				
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Pagu indikatif	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana					
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12				
4	01	01	2.14		Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan		830,947,040	Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan		830,947,040					
4	01	01	2.14	01	Fasilitasi Keprotokolan	Bagian Protokol	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan	110	282,986,380	Fasilitasi Keprotokolan	Bagian Protokol	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan	110	282,986,380	
4	01	01	2.14	02	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan		Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	120	332,429,590	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan		Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	120	332,429,590	
4	01	01	2.14	03	Pendokumentasian Tugas Pimpinan		Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan	220	215,531,070	Pendokumentasian Tugas Pimpinan		Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan	220	215,531,070	
4	01	02			PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT		1,067,828,350	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT		1,067,828,350					
4	01	02	2.01		Administrasi Tata Pemerintahan		756,985,350	Administrasi Tata Pemerintahan		756,985,350					
4	01	02	2.01	01	Penataan Administrasi Pemerintahan	Bagian Tata Pemerintahan	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan	2	108,537,161	Penataan Administrasi Pemerintahan	Bagian Tata Pemerintahan	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan	2	108,537,161	
4	01	02	2.01	02	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	3	403,051,189	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	3	403,051,189	
4	01	02	2.01	03	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah		Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	2	245,397,000	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah		Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	2	245,397,000	
4	01	02	2.04		Fasilitasi Kerja Sama Daerah		310,843,000	Fasilitasi Kerja Sama Daerah		310,843,000					
4	01	02	2.04	01	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Bagian Tata Pemerintahan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	25	173,341,000	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Bagian Tata Pemerintahan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	25	173,341,000	

No					Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
					Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Pagu indikatif	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
-1					-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12
4	01	02	2.04	02	Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri		Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri	1	30,650,000	Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri		Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri	1	30,650,000	
4	01	02	2.04	03	Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama		Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	2	106,852,000	Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama		Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	2	106,852,000	
4	01	02	2.03		Fasilitasi dan Koordinasi Hukum				1,236,911,040	Fasilitasi dan Koordinasi Hukum				1,236,911,040	
4	01	02	2.03	01	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Bagian Hukum	Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun	530	399,403,000	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Bagian Hukum	Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun	530	399,403,000	
4	01	02	2.03	02	Fasilitasi Bantuan Hukum		Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum	3	597,833,250	Fasilitasi Bantuan Hukum		Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum	3	597,833,250	
4	01	02	2.03	03	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum		Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi	560	239,674,790	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum		Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi	560	239,674,790	
4	01	02	2.02		Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat				8,708,737,683	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat				8,708,737,683	
4	01	02	2.02	01	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Bagian Kesra	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual Jumlah fasilitasi pengelolaan bina mental spritual (perayaan hari	3	945,922,337	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Bagian Kesra	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual Jumlah fasilitasi pengelolaan bina mental spritual (perayaan hari	3	945,922,337	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting	
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Pagu indikatif	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana		
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	
			besar agama, haji daerah, MTQ, rukyatul hilah, peribadatan, pendidikan agama, kebijakan bidang keagamaan, rapat koordinasi bidang keagamaan)	100				besar agama, haji daerah, MTQ, rukyatul hilah, peribadatan, pendidikan agama, kebijakan bidang keagamaan, rapat koordinasi bidang keagamaan)	100			
4	01	02	2.02	02	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB	2	2,415,439,006	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB	2	2,415,439,006

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting				
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Pagu indikatif	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana					
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12				
4	01	02	2.02	03	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas Jumlah penyusunan pelaksanaan dan evaluasi capaian kinerja kebijakan kesejahteraan masyarakat (urusan pemuda olahraga, kepramukaan , budaya, pariwisata, pendidikan , kependudukan pencatatan sipil, dan transmigrasi, dan batuan mahasiswa)	3	100	5,347,376,340	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas Jumlah penyusunan pelaksanaan dan evaluasi capaian kinerja kebijakan kesejahteraan masyarakat (urusan pemuda olahraga, kepramukaan , budaya, pariwisata, pendidikan , kependudukan pencatatan sipil, dan transmigrasi, dan batuan mahasiswa)	3	100	5,347,376,340	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting				
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Pagu indikatif	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana					
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12				
4	01	03			PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	745,196,150	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN			745,196,150					
4	01	03	2.01		Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	652,796,150	Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian			652,796,150					
4	01	03	2.01	01	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Bagian Perekonomian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	4	398,985,310	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Bagian Perekonomian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	4	398,985,310	
4	01	03	2.01	02	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian		Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	5	214,810,840	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian		Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	5	214,810,840	
4	01	03	2.01	03	Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil		Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	2	39,000,000	Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil		Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	2	39,000,000	
4	01	03	2.04		Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	92,400,000	Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam			92,400,000					
4	01	03	2.04	01	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	Bagian Perekonomian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian,	5	34,000,000	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	Bagian Perekonomian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan,	5	34,000,000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting	
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Pagu indikatif	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana		
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	
			KUKM, Penanaman Modal, Tenaga Kerja					Perindustrian, KUKM, Penanaman Modal, Tenaga Kerja				
4	01	03	2.04	02	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertambangan dan Sumber Daya Mineral, Lingkungan Hidup, Kominfo, Perhubungan, Statistik, Persandian	2	52,500,000	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertambangan dan Sumber Daya Mineral, Lingkungan Hidup, Kominfo, Perhubungan, Statistik, Persandian	2	52,500,000
4	01	03	2.04	03	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Energi dan Air, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Pertanahan	2	5,900,000	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Energi dan Air, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan	2	5,900,000

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting				
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Pagu indikatif	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana					
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12				
								Pemukiman, Pertanahan							
4	01	03	2.02		Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	409,625,480	Pelaksanaan Administrasi Pembangunan			409,625,480					
4	01	03	2.02	02	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Bagian Administrasi Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	2	250,026,480	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Bagian Administrasi Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	2	250,026,480	
4	01	03	2.02	03	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan		Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	1	159,599,000	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan		Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	1	159,599,000	
4	01	03	2.03		Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	1,169,525,000	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa			1,169,525,000					
4	01	03	2.03	01	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	3	528,488,000	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	3	528,488,000	
4	01	03	2.03	02	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik		Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik	0	265,085,000	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik		Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik	0	265,085,000	

No					Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
					Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Pagu indikatif	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
-1					-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12
4	01	03	2.03	03	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa		Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	86	375,952,000	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa		Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	86	375,952,000	
4	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				1,436,785,560	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				1,436,785,560	
4	01	01	2.13		Penataan Organisasi				1,436,785,560	Penataan Organisasi				1,436,785,560	
4	01	01	2.13	01	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Bagian Organisasi	Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan Jumlah perangkat daerah yang dievaluasi kelembagaannya Jumlah perangkat daerah yang telah menyelesaikan anjab dan ABK sesuai dengan SOTK yang berlaku presentase usulan penataan perangkat daerah yang ditindaklanjuti	2	500,469,000	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Bagian Organisasi	Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan Jumlah perangkat daerah yang dievaluasi kelembagaannya Jumlah perangkat daerah yang telah menyelesaikan anjab dan ABK sesuai dengan SOTK yang berlaku presentase usulan penataan perangkat daerah yang ditindaklanjuti	2	500,469,000	
		51													
		51													
		100													
4	01	01	2.13	02	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana		Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana Jumlah perangkat	2	490,213,650	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana		Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana Jumlah perangkat	2	490,213,650	
		20.00													
		30													

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Pagu indikatif	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12
			daerah yang melaksanakan survey kepuasan masyarakat (SKM) dengan hasil indeks baik jumlah perangkat daerah yang mengembangkan inovasi pelayan publik Jumlah perangkat daerah yang menyusun peta proses bisnis Jumlah perangkat yang dibina terkait dengan ke tatalaksanaan	35				daerah yang melaksanakan survey kepuasan masyarakat (SKM) dengan hasil indeks baik jumlah perangkat daerah yang mengembangkan inovasi pelayan publik Jumlah perangkat daerah yang menyusun peta proses bisnis Jumlah perangkat yang dibina terkait dengan ke tatalaksanaan	35		
			Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi jumlah perangkat daerah dengan predikat AKIP minimal B jumlah perangkat daerah yang telah	2	446,102,910	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi		Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi jumlah perangkat daerah dengan predikat AKIP minimal B jumlah perangkat	2	446,102,910	
4	01	01	2.13	03							
									51		
									7		

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting				
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Pagu indikatif	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana					
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12				
			menerapkan budaya kerja jumlah perangkat yang didampingi dalam implementasi reformasi birokrasi	51				daerah yang telah menerapkan budaya kerja jumlah perangkat yang didampingi dalam implementasi reformasi birokrasi	51						
4	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	12,106,370,200		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		12,106,370,200					
4	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	4,754,225,917		Administrasi Umum Perangkat Daerah		4,754,225,917					
4	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Bagian Umum	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	8	2,405,186,900	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Bagian Umum	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	8	2,405,186,900	
4	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	6	17,726,000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	6	17,726,000	
4	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1	162,048,700	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1	162,048,700	
4	01	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	12	14,940,000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	12	14,940,000	
4	01	01	2.06	08	Fasilitas Kunjungan Tamu		Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	220	851,730,000	Fasilitas Kunjungan Tamu		Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	220	851,730,000	

No					Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
					Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Pagu indikatif	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
-1					-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12
4	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	450	1,219,794,317	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	450	1,219,794,317	
4	01	01	2.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD		Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	2	82,800,000	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD		Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	2	82,800,000	
4	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				1,944,014,283	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				1,944,014,283	
4	01	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Bagian Umum	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2	15,021,500	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Bagian Umum	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2	15,021,500	
4	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	36	855,414,874	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	36	855,414,874	
4	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	1,073,577,909	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	1,073,577,909	
4	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				2,362,585,500	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				2,362,585,500	
4	01	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan	Bagian Umum	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	23	885,416,500	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas	Bagian Umum	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	23	885,416,500	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting	
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Pagu indikatif	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana		
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	
	Dinas Operasional atau Lapangan					Operasional atau Lapangan						
4	01 01 2.09 09		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4	818,399,000		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4	818,399,000	
4	01 01 2.09 11		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	94	658,770,000		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	94	658,770,000	
4	01 01 2.12		Fasilitas Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah			3,045,544,500	Fasilitas Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah			3,045,544,500		
4	01 01 2.12 01	Bagian Umum	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan	6	2,169,040,700	Bagian Umum	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan	6	2,169,040,700	
4	01 01 2.12 02		Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	6	752,129,800		Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	6	752,129,800	

No					Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
					Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Pagu indikatif	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
-1					-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12
4	01	01	2.12	03	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah		Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan	3	124,374,000	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah		Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan	3	124,374,000	



2.5 Penelaahan Usulan Program, Kegiatan dan Sub. kegiatan Masyarakat

Program, kegiatan dan sub. kegiatan yang diusulkan pada pemangku kepentingan didapatkan dari usulan masyarakat melalui mekanisme Musrenbang pada Sekretariat Daerah semua melalui mekanisme teknokratis.

2.6 Evaluasi Pelaksanaan Renja PD sampai dengan Triwulan II

Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja tahun berjalan dengan mengacu pada APBD Tahun berjalan Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra PD berdasarkan realisasi Program dan Kegiatan pelaksanaan Renja PD tahun-tahun sebelumnya.

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB. KEGIATAN

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Proses pembangunan yang sedang dilaksanakan saat ini berlangsung sangat cepat dan menjangkau seluruh lapisan masyarakat secara luas. Perkembangan yang cepat ini tentu harus dapat dikendalikan dan dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk menjamin agar proses perubahan yang terjadi dalam tatanan kehidupan di masyarakat dapat terkendali secara teratur dan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat. Oleh sebab itu dalam implementasinya dibutuhkan suatu mekanisme dan instrumen.

Penerapan *e-Government* merupakan suatu mekanisme yang dapat diterapkan oleh pemerintah untuk menjawab segala permasalahan berkenaan dengan pelayanan publik bagi masyarakat. Dalam *e-Government* pemerintah memaksimalkan tugas-tugas pemerintah yang meliputi *Government to Government (GtoG)*, *Government to Business (GtoB)*, dan *Government to Citizens (GtoC)*.

Dalam satu dasawarsa terakhir ini, Pemerintah telah menerbitkan beberapa kebijakan E-Government, terkait dengan ini pemerintah telah memberikan berbagai instrument sebagai penunjang proses pelayanan kepada masyarakat di berbagai bidang dengan melakukan usaha reformasi birokrasi yang bertujuan untuk menciptakan pemerintahan yang efektif dan efisien untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Bentuk layanan yang bersifat *Government to Business (G2B)* akan memberikan pengaruh terhadap kualitas layanan terhadap *Government to Citizens (G2C)* untuk memberikan pelayanan infrastruktur dan ketersediaan barang/jasa yang dibutuhkan masyarakat, mendorong kinerja pemerintah, mendorong iklim dunia usaha yang ujungnya adalah untuk meningkatkan taraf hidup rakyat.

Untuk mendukung percepatan reformasi birokrasi, pemerintah telah melakukan sejumlah regulasi salah satunya meliputi :

- a. Penyempurnaan terhadap produk hukum yang menjadi acuan dan dasar guna menunjang pembangunan di segala bidang .**
- b. Membangun system kelembagaan dan sumber daya manusia (SDM)**

c. Mengembangkan system aplikasi berbasis teknologi informasi .

Ketiga regulasi tersebut yaitu dasar hukum yang memayungi, lembaga ditingkat pembuat kebijakan maupun pelaksana yang kredibel, personil yang memiliki kompetensi, dan dukungan teknologi informasi yang memadai dapat saling terintegrasi untuk menjamin keberhasilan serta kelancaran proses pembangunan.

3.2 Tujuan dan Sasaran Program/Kegiatan.


Dalam rangka mewujudkan peningkatan kualitas pelayanan publik diperlukan tata kelola, sarana prasarana dan sumber daya manusia yang memadai untuk mendukung terlaksananya serta terwujudnya suatu tujuan dari visi dan misi yang telah ditetapkan. Dalam rangka mewujudkan hal tersebut maka Sekretariat Daerah selaku organisasi perangkat daerah dilingkup Pemerintah Kabupaten Blitar mempunyai Program, Kegiatan dan Sub. Kegiatan yang harus dilaksanakan.

Tujuan dari pelaksanaan Program, Kegiatan dan Sub. Kegiatan adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan ketertiban dalam pengelolaan administrasi di masing masing bidang pemerintahan daerah, dengan tersedianya sumberdaya manusia yang berkompeten dibidangnya masing masing.
2. Meningkatkan kemampuan dan pemahaman para pelaksana pembangunan terhadap ketentuan hukum dan aturan-aturan yang berlaku.
3. Meningkatkan profesionalisme aparatur pemerintah daerah di segala bidang.

Sedangkan yang menjadi sasaran dari pelaksanaan Program/Kegiatan dan Sub. Kegiatan adalah :

1. Terkoordinirnya seluruh program kegiatan pembangunan di Kabupaten Blitar.
2. Terlatihnya aparatur yang memiliki keterampilan dalam segala bidang.
3. Tercukupinya seluruh kebutuhan sarana prasarana dan kebutuhan lainnya di Sekretariat Daerah.

- 
4. Tersusunnya dokumen capaian kinerja dan keuangan Sekretariat Daerah yang efektif, efisien, akuntabel dan berkualitas.

3.3. Program, Kegiatan dan Sub. Kegiatan

Berdasarkan arah kebijakan pembangunan tahun 2023 selain melanjutkan dan memantapkan pembangunan yang telah dilakukan pada tahun pertama dan kedua, pembangunan tahun 2023 juga memulai pelaksanaan beberapa strategi yang belum menjadi focus pada tahun pertama dan kedua. Pada tahun 2023 untuk mencapai tujuan dan sasaran Sekretariat Daerah Kabupaten Blitar pada Rencana Kerja Tahun 2021 terdapat 4 program, 15 kegiatan dan 45 sub. kegiatan pendukung. Secara umum, program, kegiatan dan sub. kegiatan pada Rencana Kerja Tahun 2023 Sekretariat Daerah Kabupaten Blitar dapat dilihat dalam tabel 3.2 berikut ini:

Tabel 3.2

Rumusan Rencana Program, Kegiatan dan Sub. Kegiatan Sekretariat Daerah Tahun 2023

No	Rancangan Awal RKPD						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023				
	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi	Target capaian	Pagu indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif			
-1	-2		-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10		
4												
	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN											
4	0 1									16,432,937,042		
	SEKRETARIAT DAERAH										16,432,937,042	
4	0 1	0 1								16,432,937,042		
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA										16,432,937,042	
4	0 1	0 1	2.0 1							134,576,013		
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah										134,576,013	
4	0 1	0 1	2.0 1	0 1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Bagian Perencanaan dan Keuangan	10		134,576,013	10	134,576,013
4	0 1	0 1	2.0 2							15,467,413,989		15,467,413,989
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah										15,467,413,989	
4	0 1	0 1	2.0 2	0 1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Bagian Perencanaan dan Keuangan	127		15,330,314,200	127	15,330,314,200
4	0 1	0 1	2.0 2	0 5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan		6		137,099,789	6	137,099,789

						Keuangan Akhir Tahun SKPD							
4	0	0	2.1			Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan			830,947,040				830,947,040
	1	1	4										
4	0	0	2.1	0	Fasilitasi Keprotokolan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan	Bagian Protokol	110	282,986,380			110	282,986,380
	1	1	4	1									
4	0	0	2.1	0	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan		120	332,429,590			120	332,429,590
	1	1	4	2									
4	0	0	2.1	0	Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan		220	215,531,070			220	215,531,070
	1	1	4	3									
4	0	0			PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT				1,067,828,350				1,067,828,350
	1	2											
4	0	0	2.0		Administrasi Tata Pemerintahan				756,985,350				756,985,350
	1	2	1										
4	0	0	2.0	0	Penataan Administrasi Pemerintahan	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan	Bagian Tata Pemerintahan	2	108,537,161			2	108,537,161
	1	2	1	1									
4	0	0	2.0	0	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan		3	403,051,189			3	403,051,189
	1	2	1	2									
4	0	0	2.0	0	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah		2	245,397,000			2	245,397,000
	1	2	1	3									
4	0	0	2.0		Fasilitasi Kerja Sama Daerah				310,843,000				310,843,000
	1	2	4										

4	0	0	2.0	0	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Bagian Tata Pemerintahan	25	173,341,000			25	173,341,000
4	0	0	2.0	0	Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri		1	30,650,000			1	30,650,000
4	0	0	2.0	0	Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama		2	106,852,000			2	106,852,000
4	0	0	2.0		Fasilitasi dan Koordinasi Hukum				1,236,911,040				1,236,911,040
4	0	0	2.0	0	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun	Bagian Hukum	530	399,403,000			530	399,403,000
4	0	0	2.0	0	Fasilitasi Bantuan Hukum	Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum		3	597,833,250			3	597,833,250
4	0	0	2.0	0	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi		560	239,674,790			560	239,674,790
4	0	0	2.0		Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat				8,708,737,683				8,708,737,683
4	0	0	2.0	0	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual Jumlah fasilitasi pengelolaan bina mental spritual (perayaan hari besar agama, haji daerah, MTQ, rukyatul hilah, peribadatan,	Bagian Kesra	3	945,922,337			3	945,922,337
4	1	2	2	1				100				100	

						pendidikan agama, kebijakan bidang keagamaan, rapat koordinasi bidang keagamaan)							
4	0 1	0 2	2.0 2	0 2	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB		2	2,415,439,006			2	2,415,439,006
4	0 1	0 2	2.0 2	0 3	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan,		3	5,347,376,340			3	5,347,376,340
								100				100	

						Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas Jumlah penyusunan pelaksanaan dan evaluasi capaian kinerja kebijakan kesejahteraan masyarakat (urusan pemuda olahraga, kepramukaan , budaya, pariwisata, pendidikan , kependudukan pencatatan sipil, dan transmigrasi, dan batuan mahasiswa)							
4	0 1	0 3			PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN				745,196,150				745,196,150
4	0 1	0 3	2.0 1		Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian				652,796,150				652,796,150
4	0 1	0 3	2.0 1	0 1	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Bagian Perekonom ian	4	398,985,310			4	398,985,310
4	0 1	0 3	2.0 1	0 2	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian		5	214,810,840			5	214,810,840
4	0 1	0 3	2.0 1	0 3	Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil		2	39,000,000			2	39,000,000

4	0	0	2.0		Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam				92,400,000				92,400,000
4	0	0	2.0	0	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, KUKM, Penanaman Modal, Tenaga Kerja	Bagian Perekonomian	5	34,000,000			5	34,000,000
4	0	0	2.0	0	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertambangan dan Sumber Daya Mineral, Lingkungan Hidup, Kominfo, Perhubungan, Statistik, Persandian		2	52,500,000			2	52,500,000
4	0	0	2.0	0	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Energi dan Air, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Pertanahan		2	5,900,000			2	5,900,000

4	0	0	2.0		Pelaksanaan Administrasi Pembangunan				409,625,480				409,625,480
4	0	0	2.0	0	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan		2	250,026,480			2	250,026,480
4	0	0	2.0	0	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan		1	159,599,000			1	159,599,000
4	0	0	2.0		Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa				1,169,525,000				1,169,525,000
4	0	0	2.0	0	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	3	528,488,000			3	528,488,000
4	0	0	2.0	0	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik		0	265,085,000			0	265,085,000
4	0	0	2.0	0	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa		86	375,952,000			86	375,952,000
4	0	0			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				1,436,785,560				1,436,785,560
4	0	0	2.1		Penataan Organisasi				1,436,785,560				1,436,785,560
4	0	0	2.1	0	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan	Bagian Organisasi	2	500,469,000			2	500,469,000
	1	1	3	1				51				51	

						Analisis Jabatan Jumlah perangkat daerah yang dievaluasi Jumlah perangkat daerah yang telah menyelesaikan anjab dan ABK sesuai dengan SOTK yang berlaku presentase usulan penataan perangkat daerah yang ditindaklanjuti	51			51	
							100			100	
4	0	0	2.1	0	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana Jumlah perangkat daerah yang melaksanakan survey kepuasan masyarakat (SKM) dengan hasil indeks baik jumlah perangkat daerah yang mengembangkan inovasi pelayan publik Jumlah perangkat daerah yang menyusun peta proses bisnis Jumlah perangkat yang dibina terkait	2	490,213,650		2	490,213,650
	1	1	3	2			20.00			20.00	
							30			30	
							35			35	
							35			35	

						dengan ke tatalaksanaan							
4	0	0	2.1	0	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi		2	446,102,910			2	446,102,910
	1	1	3	3		jumlah perangkat daerah dengan predikat AKIP minimal B		51				51	
						jumlah perangkat daerah yang telah menerapkan budaya kerja		7				7	
						jumlah perangkat yang didampingi dalam implementasi reformasi birokrasi		51				51	
4	0	0			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				12,106,370,200				12,106,370,200
4	0	0	2.0		Administrasi Umum Perangkat Daerah				4,754,225,917				4,754,225,917
	1	1	6										
4	0	0	2.0	0	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Bagian Umum	8	2,405,186,900			8	2,405,186,900
	1	1	6	2									
4	0	0	2.0	0	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		6	17,726,000			6	17,726,000
	1	1	6	4									
4	0	0	2.0	0	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan		1	162,048,700			1	162,048,700
	1	1	6	5									

4	0	0	2.0	0	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan		12	14,940,000			12	14,940,000
4	1	1	6	6									
4	0	0	2.0	0	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu		220	851,730,000			220	851,730,000
4	1	1	6	8									
4	0	0	2.0	0	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		450	1,219,794,317			450	1,219,794,317
4	1	1	6	9									
4	0	0	2.0	1	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD		2	82,800,000			2	82,800,000
4	1	1	6	0									
4	0	0	2.0		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				1,944,014,283				1,944,014,283
4	1	1	8										
4	0	0	2.0	0	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Bagian Umum	2	15,021,500			2	15,021,500
4	1	1	8	1									
4	0	0	2.0	0	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		36	855,414,874			36	855,414,874
4	1	1	8	2									
4	0	0	2.0	0	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		12	1,073,577,909			12	1,073,577,909
4	1	1	8	4									
4	0	0	2.0		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				2,362,585,500				2,362,585,500
4	1	1	9										
4	0	0	2.0	0	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan	Bagian Umum	23	885,416,500			23	885,416,500
4	1	1	9	2									

					Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	dibayarkan Pajak dan Perizinannya							
4	0 1	0 1	2.0 9	0 9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		4	818,399,000			4	818,399,000
4	0 1	0 1	2.0 9	1 1	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		94	658,770,000			94	658,770,000
4	0 1	0 1	2.1 2		Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah				3,045,544,500				3,045,544,500
4	0 1	0 1	2.1 2	0 1	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan	Bagian Umum	6	2,169,040,700			6	2,169,040,700
4	0 1	0 1	2.1 2	0 2	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan		6	752,129,800			6	752,129,800
4	0 1	0 1	2.1 2	0 3	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan		3	124,374,000			3	124,374,000





BAB IV

RENCANA KERJA PERUBAHAN DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

4.1 Rencana Kerja Perubahan dan Pendanaan

Program, Kegiatan dan Sub. Kegiatan merupakan penjabaran dari visi dan misi yang telah disepakati sebagaimana tersebut dalam Renstra SKPD dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan oleh SKPD, Program, Kegiatan dan Sub. Kegiatan yang dilaksanakan oleh Sekretariat Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2023 berdasarkan Renja adalah 4 program dan 15 kegiatan dan 45 sub. kegiatan. Dengan anggaran sebesar Rp. 36.715.565.247,-

Program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Sekretariat Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2023 dibiayai/didanaikan dari APBD Kabupaten Blitar Tahun 2023.

Adapun Rencana Program dan Kegiatan dapat dilihat pada table sebagai berikut:

**RENJA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BLITAR TA. 2023
SESUAI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB. KEGIATAN**

SKPD : SEKRETARIAT DAERAH

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024					
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)			
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur				
4					UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN											
4	0 1				SEKRETARIAT DAERAH					16,432,937,042			18,014,274,338			
4	0 1	0 1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					16,432,937,042			18,014,274,338			
4	0 1	0 1	2. 01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					134,576,013			134,560,600			
4	0 1	0 1	2. 01	0 1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Kab. Blitar, Kanigoro, Kanigoro		10 Dokume n		134,576,013	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		134,560,600
4	0 1	0 1	2. 02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					15,467,413,989			17,014,155,388			
4	0 1	0 1	2. 02	0 1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				127 Orang/b u	lan	15,330,314,200	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		16,863,345,620
4	0 1	0 1	2. 02	0 5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		Kab. Blitar, Semua Kecamata n, Semua Kelurahan		6 Laporan		137,099,789	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		150,809,768

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catat an Penti ng	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
		Capai an Progr am	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	
4 0 1 1 0 2. 14	Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan								830,947,040			865,558,350	
4 0 1 1 0 2. 14 1	Fasilitasi Keprotokolan		Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan		Kab. Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		110 Laporan		282,986,380			282,986,380	
4 0 1 1 0 2. 14 2	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan		Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan				120 Laporan		332,429,590	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		332,429,590	
4 0 1 1 0 2. 14 3	Pendokumentasian Tugas Pimpinan		Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan				220 Laporan		215,531,070	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		250,142,380	
TOTAL									16,432,937,042			18,014,274,338	
4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN												
4 0 1	SEKRETARIAT DAERAH									1,067,828,350		1,721,037,161	
4 0 1 2	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT									1,067,828,350		1,721,037,161	
4 0 1 2 01	Administrasi Tata Pemerintahan									756,985,350		1,346,037,161	
4 0 1 2 01 1	Penataan Administrasi Pemerintahan		Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan				2 Dokumen		108,537,161			108,537,161	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catat an Penti ng	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
		Capai an Progr am	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	
4 0 1 2 01 2	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan				3 Dokume n		403,051,189			905,000,000	
4 0 1 2 01 3	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah		Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah				2 Dokume n		245,397,000			332,500,000	
4 0 1 2 04	Fasilitasi Kerja Sama Daerah								310,843,000			375,000,000	
4 0 1 2 04 1	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri		Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri				25 Dokume n		173,341,000			200,000,000	
4 0 1 2 04 2	Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri		Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri				1 Dokume n		30,650,000			75,000,000	
4 0 1 2 04 3	Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama		Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama				2 Laporan		106,852,000			100,000,000	
TOTAL									1,067,828,350			1,721,037,161	
4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN												
4 0 1	SEKRETARIAT DAERAH								1,236,911,040			0	
4 0 1 2	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT								1,236,911,040			0	
4 0 1 2 03	Fasilitasi dan Koordinasi Hukum								1,236,911,040			0	
4 0 1 2 03 1	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah		Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun				530 Dokume n		399,403,000	Dana Transfer Umum-		0	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catat an Penti ng	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
		Capai an Progr am	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	
										Dana Alokasi Umum			
4 0 1 2 03 2	Fasilitasi Bantuan Hukum		Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum				3 Kasus		597,833,250	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		0	
4 0 1 2 03 3	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum		Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi				560 Dokume n		239,674,790	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		0	
TOTAL									1,236,911,040			0	
4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN												
4 0 1	SEKRETARIAT DAERAH								8,708,737,683			100,000,000	
4 0 1 2	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT								8,708,737,683			100,000,000	
4 0 1 2 02	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat								8,708,737,683			100,000,000	



Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	
4 0 0 2 0 1	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual		Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual Jumlah fasilitasi pengelolaan bina mental spritual (perayaan hari besar agama, haji daerah, MTQ, rukyatul hilah, peribadatan, pendidikan agama, kebijakan bidang keagamaan, rapat koordinasi bidang keagamaan)		Kab. Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		3 Dokumen 100 presentasi	e	945,922,337	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			100,000,000



Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catat an Penti ng	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
		Capai an Progr am	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	
4 0 1 0 2 0 2	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial		Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB				2 Dokume n		2,415,439,006	PENDAPA TAN ASLI DAERAH (PAD)		0	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catat an Penti ng	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
		Capai an Progr am	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	
4 0 1 0 2 02 0 3	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat		Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas Jumlah penyusunan pelaksanaan dan evaluasi capaian kinerja kebijakan kesejahteraan masyarakat (urusan pemuda olahraga, kepramukaan , budaya, pariwisata, pendidikan , kependudukan pencatatan sipil, dan transmigrasi, dan batuan mahasiswa)				3 Dokume n 100 presenta s	e	5,347,376,340	PENDAPA TAN ASLI DAERAH (PAD)		0	
TOTAL									8,708,737,683			100,000,000	
4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN												

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	
4 0 0 2. 0 1 3 04 0 1	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, KUKM, Penanaman Modal, Tenaga Kerja	Tersusunnya kebijakan bidang Sumber Daya Alam	Kab. Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		5 Dokumen	11 kebijakan	34,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)		3,090,000,000	
4 0 0 2. 0 1 3 04 0 2	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertambangan dan Sumber Daya Mineral, Lingkungan Hidup, Kominfo, Perhubungan, Statistik, Persandian	Tersusunnya kebijakan bidang Sumber Daya Alam	Kab. Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		2 Dokumen	11 kebijakan	52,500,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		441,000,000	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	
4 0 0 2. 0 1 3 04 3	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Energi dan Air, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Pertanahan	Tersusunnya kebijakan bidang Sumber Daya Alam	Kab. Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		2 Dokumen	11 kebijakan	5,900,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		88,200,000	
TOTAL									745,196,150			5,031,837,000	
4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN												
4 0 1	SEKRETARIAT DAERAH												
4 0 1 3	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN												
4 0 1 3 02	Pelaksanaan Administrasi Pembangunan												
4 0 1 3 02 2	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan		Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan				2 Laporan		250,026,480	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		250,026,480	
4 0 1 3 02 3	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan		Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan				1 Laporan		159,599,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		159,599,000	
TOTAL									409,625,480			409,625,480	
4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN												

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catat an Penti ng	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024					
		Capai an Progr am	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)			
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur				
4 0 1													SEKRETARIAT DAERAH	1,169,525,000		1,466,761,520
4 0 1	0 3												PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	1,169,525,000		1,466,761,520
4 0 1	0 3	2. 03											Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	1,169,525,000		1,466,761,520
4 0 1	0 3	2. 03	0 1	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa				3 Dokume n				528,488,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	672,068,970
4 0 1	0 3	2. 03	0 2	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik		Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik				0 Dokume n				265,085,000		304,847,750
4 0 1	0 3	2. 03	0 3	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa		Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa				86 Orang				375,952,000		489,844,800
TOTAL														1,169,525,000		1,466,761,520
4													UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN			
4 0 1													SEKRETARIAT DAERAH	1,436,785,560		500,469,000
4 0 1	0 1												PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1,436,785,560		500,469,000
4 0 1	0 1	2. 13		Penataan Organisasi										1,436,785,560		500,469,000



Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catat an Penti ng	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
		Capai an Progr am	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	
4 0 1 0 1 2. 13 0 1	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan		Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan Jumlah perangkat daerah yang dievaluasi kelembagaannya Jumlah perangkat daerah yang telah menyelesaikan anjab dan ABK sesuai dengan SOTK yang berlaku presentase usulan penataan perangkat daerah yang ditindaklanjuti				2 Dokume n 51 perangk at daerah 51 perangk at daerah 100 presenta s	e	500,469,000	PENDAPA TAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		500,469,000	



Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catat an Penti ng	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
		Capai an Progr am	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	
4 0 1 0 1 2 13 0 2	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana		Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana Jumlah perangkat daerah yang melaksanakan survey kepuasan masyarakat (SKM) dengan hasil indeks baik jumlah perangkat daerah yang mengembangkan inovasi pelayan publik Jumlah perangkat daerah yang menyusun peta proses bisnis Jumlah perangkat yang dibina terkait dengan ke tatalaksanaan				2 Laporan 20 perangk at daerah 30 perangk at daerah 35 perangk at daerah 35 perangk at daerah		490,213,650	PENDAPA TAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		0	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catat an Penti ng	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024					
		Capai an Progr am	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)			
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur				
4 0 1 1 13 0 3	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi		Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi jumlah perangkat daerah dengan predikat AKIP minimal B jumlah perangkat daerah yang telah menerapkan budaya kerja jumlah perangkat yang didampingi dalam implementasi reformasi birokrasi				2 Dokume n 51 perangk at daerah 7 perangk at daerah 51 perangk at daerah		446,102,910	PENDAPA TAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		0				
TOTAL									1,436,785,560			500,469,000				
4					UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN											
4 0 1					SEKRETARIAT DAERAH							12,106,370,200		14,846,705,951		
4 0 1		0 1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA							12,106,370,200		14,846,705,951		
4 0 1		0 1	2. 06		Administrasi Umum Perangkat Daerah							4,754,225,917		4,738,419,554		
4 0 1	0 1	0 1	2. 06	0 2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				8 Paket		2,405,186,900	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1,254,331,254
4 0 1	0 1	0 1	2. 06	0 4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				6 Paket		17,726,000	Dana Transfer Umum-Dana		431,244,000

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catat an Penti ng	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024				
		Capai an Progr am	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)		
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur			
											Alokasi Umum				
4 0 1	0 1	0 1	2. 06	0 5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	162,048,700	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		165,000,000
4 1	0 1	0 1	2. 06	0 6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan yang Disediakan				12 Dokume n	14,940,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		15,000,000
4 1	0 1	0 1	2. 06	0 8	Fasilitas Kunjungan Tamu		Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu				220 Laporan	851,730,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		1,457,844,300
4 1	0 1	0 1	2. 06	0 9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				450 Laporan	1,219,794,317	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		1,325,000,000
4 1	0 1	0 1	2. 06	1 0	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD		Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				2 Dokume n	82,800,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		90,000,000
4 1	0 1	0 1	2. 08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							1,944,014,283			2,471,042,156

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catat an Penti ng	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
		Capai an Progr am	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	
4 0 1 0 1 0 08 1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat					2 Laporan		15,021,500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		11,911,240
4 0 1 0 1 0 08 2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan					36 Laporan		855,414,874	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1,511,416,566
4 0 1 0 1 0 08 4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan					12 Laporan		1,073,577,909	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		947,714,350
4 0 1 0 1 0 09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah									2,362,585,500			2,714,851,590
4 0 1 0 1 0 09 2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya					23 Unit		885,416,500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		964,605,950
4 0 1 0 1 0 09 9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi					4 Unit		818,399,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1,365,743,940

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	
4 0 1 0 1 2. 09 1 1	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi					94 Unit		658,770,000			384,501,700
4 0 1 1 1 2.	Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah									3,045,544,500			4,922,392,651
4 0 1 1 1 2. 12 0 1	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah		Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan					6 Paket		2,169,040,700	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2,930,973,441
4 0 1 1 1 2. 12 0 2	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah		Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan					6 Paket		752,129,800	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1,870,419,210
4 0 1 1 1 2. 12 0 3	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah		Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan					3 Paket		124,374,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		121,000,000
TOTAL										12,106,370,200			14,846,705,951



BAB IV

PENUTUP

Penyusunan Renja Sekretariat Daerah Tahun 2023 dalam program, kegiatan dan sub. kegiatan sudah mengacu pada Renstra Sekretariat Daerah Kabupaten Blitar untuk Tahun 2023, Penetapan pagu anggaran dalam DPA Sekretariat Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2023 sebesar Rp. 36.715.565.247,- pagu indikatif tersebut setelah dilaksanakan untuk membiayai kegiatan yang telah direncanakan dalam Renja Tahun 2023.

Renja Sekretariat Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2023 melaksanakan 4 program dan 15 kegiatan dan 45 sub. kegiatan, dalam Renja Sekretariat Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2023, dengan Jumlah Anggaran sebesar Rp. 36.715.565.247,-

Dokumen Renja Sekretariat Daerah ini diharapkan dapat direalisasikan dalam Perubahan APBD Tahun 2021 dalam rangka mendukung visi dan misi Pemerintah Kabupaten Blitar.